PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **I WAYAN ARTANAYASA**
2. Jabatan : **WAKIL REKTOR BIDANG PERENCANAAN, KEUANGAN DAN UMUM**
3. NHK : **514124**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN — **Rp. 1.284.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/250 m2 di KAB / KOTA BULELENG, WARISAN Rp. 422.000.000
2. Tanah Seluas 4.700 m2 di KAB / KOTA BANGLI, WARISAN Rp. 387.000.000
3. Tanah Seluas 108 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 322.000.000
4. Tanah Seluas 250 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 153.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN — **Rp. 198.500.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000
2. MOTOR, PCX SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
3. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 142.000.000
4. MOTOR, SCOOPY SEPEDA MOTOR Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA — **Rp. 16.000.000**

D. SURAT BERHARGA — **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS — **Rp. 173.275.762**

F.	**HARTA LAINNYA**	**Rp.**	**----**
	Sub Total	**Rp.**	**1.672.275.762**
III.	**HUTANG**	**Rp.**	**988.000.000**
IV.	**TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**	**Rp.**	**684.275.762**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.